

Masyarakat Lokal dan Hutan: Menyelaraskan Perekonomian Rumah Tangga Petani dan Kawasan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas

Afriel Amar Ar Rasyid^{1*}, Arya Hadi Dharmawan^{1,2}

¹Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

²Pusat Studi Agraria, IPB University

*Email: afrielamar@gmail.com, adharna@apps.ipb.ac.id

Artikel diterima : 17 Oktober 2025. Revisi diterima : 16 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the socio-ecological relationship between the community of Rantau Jaya Udik II Village and Way Kambas National Park (TNWK), as well as community adaptation patterns as an effort to align economic livelihoods with government conservation policies. Using a mixed-methods approach, data was collected through in-depth interviews, participatory observation, and questionnaires to analyze household income patterns and natural resource management. The results indicate that farming households in Rantau Jaya Udik II Village rely on the agriculture sector, but income diversification through the Forest Farmers Group (KTH) and other conservation programs, such as beekeeping and ecosystem restoration, provides additional sustainable income. However, human-wildlife conflicts and restrictions on access to natural resources remain significant challenges in balancing conservation and economic needs. This study concludes that community organization through KTH and ecotourism programs provides more stable economic opportunities, though there is a need to improve the distribution of economic benefits to achieve more equitable welfare among the community. With active participation in conservation, the community can align economic needs with environmental preservation.

Key words: farm households, national park, social-ecological relations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan sosial-ekologi antara masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), serta pola adaptasi sebagai upaya menyelaraskan antara penghidupan ekonomi masyarakat dan kebijakan konservasi pemerintah. Menggunakan pendekatan mixed-method, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kuesioner untuk menganalisis pola pendapatan rumah tangga dan pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga petani di Desa Rantau Jaya Udik II mengandalkan sektor pertanian, tetapi diversifikasi pendapatan melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) dan program konservasi lainnya, seperti budidaya lebah madu dan restorasi ekosistem, memberikan tambahan pendapatan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, konflik manusia-satwa liar dan pembatasan akses terhadap sumber daya alam menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengorganisasian komunitas melalui KTH dan program ekowisata memberikan peluang ekonomi yang lebih stabil, namun perlu ada perbaikan dalam distribusi manfaat ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata di kalangan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif dalam konservasi, masyarakat dapat menyelaraskan kebutuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Kata kunci: hubungan sosial-ekologi, rumah tangga petani, taman nasional.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan hutan terbesar di dunia dengan memiliki luas kawasan hutan yang mencapai 121,85 juta hektar pada tahun 2021 (BPS 2023). Hutan-hutan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, melindungi keanekaragaman hayati, serta menyediakan sumber daya alam vital bagi kehidupan masyarakat (Anderies et al 2004).

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Provinsi Lampung merupakan salah satu contoh kawasan konservasi yang memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. TNWK, yang melindungi habitat spesies langka seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera (KLHK 2022), juga memberikan penghidupan bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, dan getah pinus.

Namun, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam ini sering kali berbenturan dengan tujuan konservasi, menciptakan dinamika sosial-ekologi yang kompleks. Aktivitas ilegal seperti perambahan lahan dan pembakaran hutan, serta konflik manusia-satwa liar, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pengelolaan TNWK. Masyarakat lokal, seperti yang terjadi di Desa Rantau Jaya Udik II, harus beradaptasi dengan pembatasan akses terhadap lahan dan sumber daya alam yang semakin terbatas. Dalam hal ini, konflik gajah-manusia menjadi tantangan utama yang memperburuk ketegangan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi. Konflik ini terjadi karena jalur jelajah alami gajah untuk mencari pakan sering kali bersinggungan dengan wilayah pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Sebagai solusi untuk meminimalkan dampak kerugian, pihak TNWK telah menerapkan mitigasi fisik berupa pembangunan kanal pembatas serta penggunaan teknologi GPS collar pada gajah betina untuk memantau pergerakan kelompok gajah secara real-time. Selain itu, pengorganisasian masyarakat melalui Masyarakat Mitra Polhut (MMP) diperkuat sebagai garda terdepan dalam peringatan dini dan penanganan konflik di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, istilah masyarakat lokal merujuk pada kelompok penduduk yang menetap secara permanen di wilayah penyangga kawasan konservasi dan memiliki ketergantungan serta interaksi sosial-ekonomi yang intensif dengan ekosistem hutan (Dharmawan 2024). Berbeda dengan masyarakat adat yang basis klaimnya didasarkan pada hak ulayat dan sejarah asal-usul, masyarakat lokal di Desa Rantau Jaya Udik II lebih tepat dikategorikan sebagai masyarakat sekitar hutan. Hal ini dikarenakan latar belakang mereka sebagai masyarakat transmigran yang telah membangun sistem sosial-ekologi baru yang adaptif terhadap kebijakan konservasi negara, di mana identitas kolektif mereka terbentuk melalui interaksi fungsional dengan kawasan TNWK.

Tantangan sosial-ekologi yang dihadapi oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi menuntut penyesuaian dalam cara mereka memanfaatkan sumber daya alam. Dharmawan (2024) mengidentifikasi tiga tipe utama ketergantungan dan hubungan masyarakat dengan hutan yang sangat relevan dalam konteks TNWK: 1) Tipe Adaptif: Masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ekosistem melalui pengelolaan berkelanjutan, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pertanian atau pengelolaan hutan yang lebih baik. 2) Tipe Eksploitatif: Pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui daya dukung

ekosistem, sehingga memicu kerusakan lingkungan dan konflik sosial, seperti perambahan hutan dan perburuan liar. 3) Tipe Konservatif: Upaya pelestarian melalui reforestasi, penyelamatan daerah aliran sungai, dan tata kelola multi-aktor untuk menjaga keseimbangan ekologis. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II terus berupaya mencari keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup dan pelestarian alam melalui transisi menuju hubungan yang lebih konservatif.

Hubungan sosial-ekologi di kawasan ini juga mencerminkan konsep koeksistensi, yang menjelaskan keadaan di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis, seperti yang tercermin dalam kehidupan masyarakat sekitar TNWK yang berinteraksi dengan satwa liar, termasuk gajah. Konsep ini sering digunakan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana kedua pihak—manusia dan alam—dapat saling mendukung tanpa merusak keseimbangan ekosistem (Dharmawan 2007). Dalam hal ini, penerapan konsep koeksistensi dapat menjadi dasar dalam menciptakan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang memperhatikan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat lokal sekaligus tujuan pelestarian alam.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan model pengelolaan kawasan konservasi yang inklusif. Meskipun pihak pengelola TNWK telah menerapkan program Kemitraan Konservasi yang mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.8/2019 untuk melegalkan akses masyarakat terhadap sumber daya tertentu, implementasi model ini di lapangan masih memerlukan evaluasi mendalam terkait aspek keadilan distribusi manfaatnya. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini dibandingkan model pengelolaan TNWK sebelumnya adalah penggunaan perspektif sistem sosial-ekologi (Dharmawan 2024) untuk memetakan trajektori perubahan perilaku masyarakat dari eksploitatif menjadi restoratif, serta mengusulkan integrasi konsep "Model Kampung Konservasi" yang lebih partisipatif dibandingkan sekadar kemitraan administratif. Penelitian ini menekan pada penciptaan model pengelolaan yang tidak hanya mengakui hak ekonomi masyarakat, tetapi juga menempatkan mereka sebagai aktor kunci dalam tata kelola konservasi yang inklusif dan berkelanjutan.

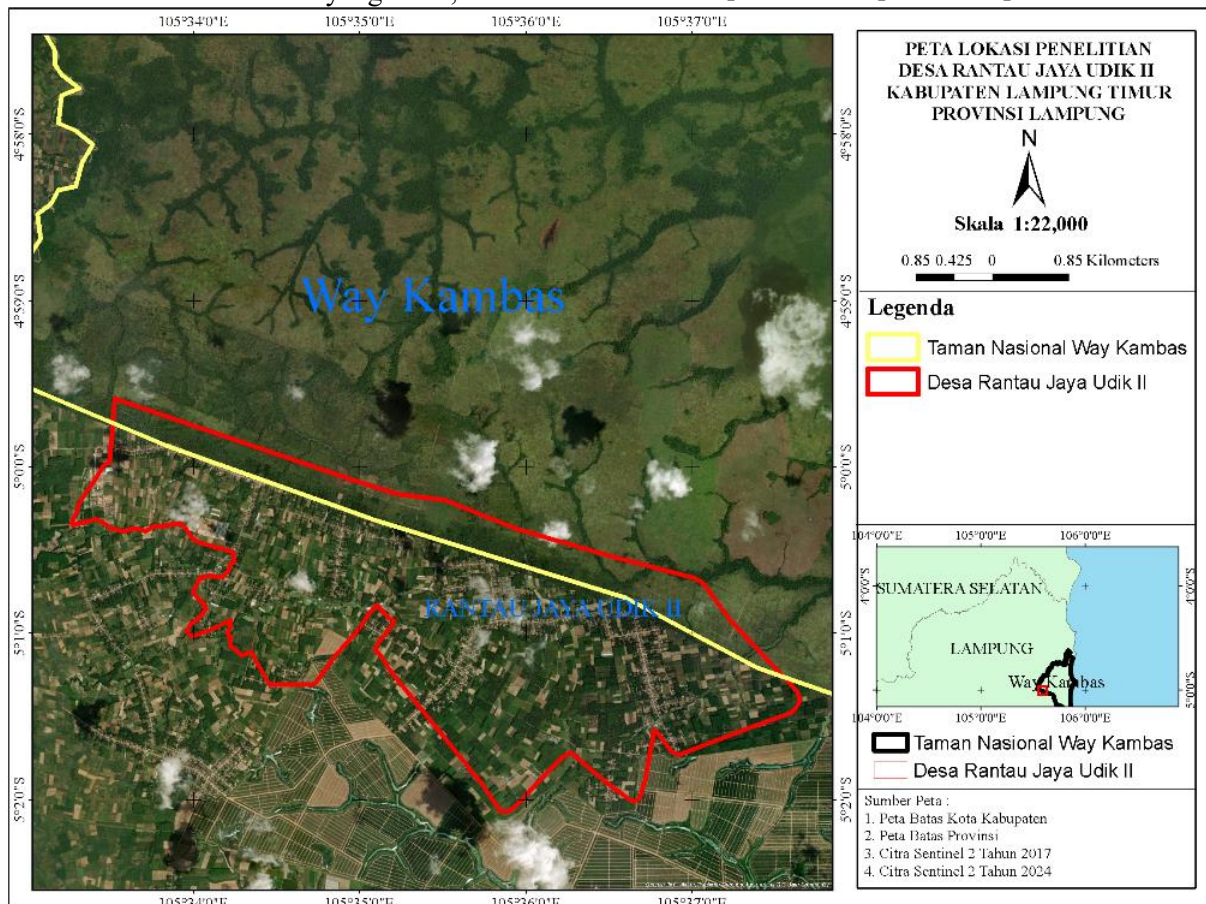
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantau Jaya Udik II, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan khusus: (1) Desa Rantau Jaya Udik II merupakan desa penyangga yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar TNWK, (2) Desa ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang unik, di mana

letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi mampu diintegrasikan oleh sebagian penduduk menjadi sumber penghasilan, salah satunya melalui penerimaan insentif atas partisipasi mereka sebagai Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di samping ketergantungan utama pada sektor pertanian, serta (3) Lokasi ini memiliki tantangan yang relevan dalam hal konservasi, khususnya terkait dengan pengelolaan satwa liar seperti gajah yang seringkali berkonflik dengan aktivitas manusia.

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari Februari hingga Agustus 2025. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian. Desa Rantau Jaya Udik II

(Polisi Kehutan/Polhut), aparat Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II, serta tokoh masyarakat

Prosedur Penelitian

Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data kualitatif terkait hubungan sosial-ekologi antara masyarakat dan ekosistem di sekitar TNWK. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan dan pengalaman peserta terkait fenomena yang diteliti (Sugiyono 2017). Wawancara dilakukan dengan informan-informan kunci yang terdiri dari pihak pengelola TNWK

setempat. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang kebijakan, sejarah tata kelola hutan, serta tantangan yang dihadapi terkait konservasi dan penghidupan masyarakat.

Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung pola-pola pengelolaan hasil hutan dan interaksi masyarakat dengan

ekosistem. Peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti pengumpulan madu, pengelolaan hasil pertanian, serta partisipasi dalam kegiatan konservasi bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Observasi ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika sosial-ekologi yang tidak dapat diperoleh hanya dari wawancara..

Kuesioner

Kuesioner terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai karakteristik rumah tangga petani, struktur nafkah, dan strategi penghidupan yang mereka terapkan. Kuesioner ini diisi oleh 40 responden kepala rumah tangga petani, yang ditarik menggunakan teknik purposive sampling untuk mewakili dua kelompok utama, yakni anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Non-KTH. Pemilihan 40 responden ini difokuskan pada analisis komparatif antara kedua kelompok tersebut dan dinilai telah memenuhi kaidah batas minimal kelayakan ukuran sampel ($n \geq 30$) untuk analisis statistik dasar. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan tertutup yang mengukur variabel-variabel seperti pendapatan on-farm, off-farm, dan non-farm. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis untuk menemukan hubungan antara faktor sosial-ekonomi dan adaptasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengumpulan data kualitatif (wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi) dan data kuantitatif (survei rumah tangga) akan dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis tematik dan statistik deskriptif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis data kualitatif melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan mendalam.

Proses analisis dimulai dengan reduksi data kualitatif, di mana informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi disederhanakan dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan. Data yang telah direduksi akan disusun dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tema-tema utama yang muncul, seperti hubungan sosial-ekologi antara masyarakat dan kawasan konservasi, pengelolaan sumber daya alam oleh rumah tangga petani, serta pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan konservasi.

Selain itu, data kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden, seperti umur, jenis kelamin, dan struktur nafkah rumah

tangga petani. Menurut Creswell (2014) analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti dengan cara yang sederhana, menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, modus, dan distribusi data. Proses analisis ini melibatkan perhitungan frekuensi, rata-rata, dan persentase menggunakan *software Microsoft Excel*. Tujuan utama dari analisis kuantitatif ini adalah memberikan gambaran jelas mengenai pola nafkah yang diterapkan oleh rumah tangga petani, serta persentase sebaran struktur pendapatan antar sektor (*on-farm, off-farm, non-farm*).

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, hasil analisis tematik dan statistik deskriptif akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial-ekologi di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Analisis tematik membantu menjelaskan pola-pola interaksi yang terjadi antara manusia dan alam, sementara analisis kuantitatif memberikan bukti yang lebih terukur mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Rantau Jaya Udik II terletak di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Wilayah desa ini memiliki luas sekitar 1.336,93 hektar dan terbagi menjadi lima Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT). Sebagian besar lahan di desa ini digunakan untuk pertanian, dengan komoditas utama seperti singkong, karet, dan jagung yang mendominasi sektor pertanian. Desa ini terletak di dataran rendah dengan akses terbatas menuju infrastruktur utama, termasuk jalan aspal yang masih sangat minim. Meski terletak cukup dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, desa ini menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur.

Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II mayoritas berasal dari suku Jawa, meskipun terdapat juga suku Sunda yang menjadi kelompok minoritas. Dengan populasi sekitar 4.428 jiwa, mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai petani dan buruh tani. Keberagaman sosial ini menciptakan dinamika dalam kehidupan sosial masyarakat, meskipun suku Jawa mendominasi kehidupan budaya dan tradisi sosial setempat. Desa ini juga didukung oleh berbagai lembaga sosial dan kelompok masyarakat, seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Wanita Tani (KWT), yang berperan

penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kelompok-kelompok ini cukup berperan penting. Ginting et al. (2010) mengungkapkan bahwa keberlanjutan konservasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, yang tidak hanya terfokus pada perlindungan alam tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka.

Pendidikan di Desa Rantau Jaya Udik II ini telah berkembang, meskipun akses ke pendidikan tinggi masih terbatas, yang menghambat peluang ekonomi lebih lanjut bagi sebagian besar penduduk. Secara ekonomi, desa ini sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan lebih dari 2.243 orang bekerja sebagai petani dan 976 orang sebagai buruh tani. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi singkong, karet, dan jagung, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar keluarga. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa mulai berkembang, dengan sekitar 128 orang terlibat dalam kegiatan wiraswasta. Meskipun sektor pertanian mendominasi, adanya sektor non-pertanian memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian lokal, yang mencerminkan keberagaman mata pencaharian di desa ini.

Secara ekologi, Desa Rantau Jaya Udik II bertindak sebagai kawasan penyangga (buffer zone) yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Hubungan spasial ini menjadikan masyarakat desa berinteraksi secara

intensif dengan ekosistem kawasan konservasi. Keberadaan TNWK memberikan manfaat ekologis yang nyata bagi masyarakat, seperti penyediaan jasa lingkungan berupa tata udara yang bersih, penyediaan sumber pakan alami (nektar liar) yang sangat mendukung berkembangnya usaha budidaya lebah madu masyarakat, serta ketersediaan sumber hijauan (rumput) pakan ternak bagi warga yang berpartisipasi dalam program pengelolaan kawasan. Meskipun memberikan ragam manfaat, kedekatan spasial ini juga menimbulkan tantangan yang kompleks. Konflik manusia-satwa liar, khususnya antara masyarakat petani dan gajah, menjadi masalah serius di Desa Rantau Jaya Udik II. Treves dan Karanth (2003) menjelaskan bahwa konflik seperti ini seringkali dipicu oleh pertemuan yang tidak dapat dihindari antara habitat satwa liar yang semakin menyempit dan ekspansi aktivitas pertanian manusia. Gajah sering merusak tanaman pertanian, terutama singkong dan karet, yang menjadi komoditas utama masyarakat desa. Selain itu, konversi lahan untuk pertanian dan perburuan liar menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem. Namun, berbagai inisiatif konservasi, seperti program Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) atau Masyarakat Peduli Api (MPA), berperan dalam menjaga kelestarian alam sambil memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tabel 1. Data mata pencaharian masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur (2024).

Mata Pencaharian	Jumlah orang
PNS	11 orang
TNI/Polri	4 orang
Karyawan Swasta	60 unit
Wiraswasta/Pedagang	128 orang
Petani	2243 orang
Buruh Tani	976 orang
Nelayan	0 orang
Peternak	270 orang
Jasa	15 orang
Pengrajin	10 orang
Pekerja Seni	5 orang
Pensiunan	2 orang
Lainnya	365 orang
Tidak Bekerja/Pengangguran	325 orang

Karakteristik Sosial-Ekonomi Rumah Tangga Petani

Penelitian ini mengkaji kondisi sosial-ekonomi dari 40 responden rumah tangga petani di

Desa Rantau Jaya Udik II, yang terbagi ke dalam dua kelompok utama: 20 responden anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) dan 20 responden Non-KTH. Kelompok KTH memiliki hubungan yang langsung dan intensif dengan kawasan konservasi, mengingat pembentukan kelompok ini

diinisiasi secara resmi oleh Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Keterlibatan ini membuat anggota KTH terintegrasi dalam berbagai program pelestarian kawasan, seperti kegiatan restorasi ekosistem dan partisipasi aktif sebagai Masyarakat Peduli Api (MPA), yang pada gilirannya memberikan akses insentif ekonomi tambahan bagi kehidupan mereka. Karakteristik sosial-ekonomi yang dianalisis pada kedua kelompok tersebut mencakup usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan rumah tangga, dan pekerjaan utama. Analisis terhadap karakteristik ini ditujukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai profil rumah tangga petani serta bagaimana faktor-faktor dasar tersebut memengaruhi pilihan strategi kehidupan mereka di sekitar kawasan hutan.

Sebagian besar responden berada pada usia menengah (40-54 tahun), yang mencakup 55% dari

total responden. Usia ini menunjukkan bahwa mayoritas petani masih dalam usia produktif, yang memungkinkan mereka untuk terus aktif dalam kegiatan pertanian. Kategori usia muda (<40 tahun) tercatat sebanyak 12,5%, dengan sedikit lebih banyak responden muda di kelompok KTH dibandingkan dengan kelompok non-KTH. Sementara itu, kategori usia tua (>54 tahun) tercatat 32,5%, dengan lebih banyak responden non-KTH di kelompok ini. Data ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden masih dalam usia produktif, ada perbedaan distribusi usia yang perlu diperhatikan terkait dampaknya pada kehidupan mereka.

Tabel 2. Jumlah dan persentase responden berdasarkan jenis kelamin, Desa Rantau Jaya Udik II, Sukadana, Lampung Timur, tahun 2025. Sumber: Data Primer Peneliti, diolah (2025)

Usia	Anggota KTH		Non Anggota KTH		Total	
	N	%	N	%	N	%
Muda (<40 tahun)	3	15	2	10	5	12,5
Menengah (40-54 tahun)	11	55	11	55	22	55
Tua (>54 tahun)	6	30	7	35	13	32,5
Total	20	100%	20	100%	40	100%

Tingkat pendidikan responden mayoritas hanya mencapai SD/ sederajat, yang mencakup 52,5% dari seluruh responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga petani di Desa Rantau Jaya Udik II memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, yang dapat membatasi akses mereka ke peluang ekonomi yang lebih baik. Di kelompok KTH, sebanyak 55% responden hanya menyelesaikan pendidikan hingga SD, sementara di kelompok non-KTH, angka ini sedikit lebih rendah, yaitu 50%. Hanya sebagian kecil responden yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP (20%) atau SMA (12,5%), dan sangat sedikit yang berhasil mencapai pendidikan perguruan tinggi (5%).

Selain itu, jumlah tanggungan rumah tangga bervariasi, dengan 45% responden memiliki

4 orang tanggungan. Rata-rata tanggungan rumah tangga adalah 4 orang, yang mencakup anggota keluarga inti serta keluarga besar seperti orang tua atau anak-anak yang belum mandiri secara ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam struktur rumah tangga yang dapat memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga. Di kelompok KTH, 50% responden memiliki 4 orang tanggungan, sedangkan di kelompok non-KTH, 40% responden memiliki jumlah tanggungan yang sama.

Tabel 3. Jumlah dan persentase responden berdasarkan tanggungan dalam rumah tangga, Desa Rantau Jaya Udik II, Sukadana, Lampung Timur, tahun 2025. Sumber: Data Primer Peneliti, diolah (2025)

Jumlah tanggungan	Anggota KTH		Non Anggota KTH		Total	
	N	%	N	%	N	%
1	0	0	0	0	0	0
2	1	5	2	10	3	7,5
3	5	25	6	30	11	27,5
4	10	50	8	40	18	45
5	3	15	2	10	5	12,5

6	1	5	1	5	2	5
>6	0	0	1	5	1	2,5
Total	20	100%	20	100%	40	100%

Sebagian besar responden, baik anggota KTH maupun non-KTH, bekerja di sektor pertanian, dengan 57,5% responden bekerja sebagai petani dan 10% bekerja sebagai buruh tani. Selain itu, terdapat 25% responden yang bekerja sebagai buruh tani di PT GGP, perusahaan besar yang beroperasi di dekat

desa. Perbedaan kecil dalam proporsi pekerjaan antara kelompok KTH dan non-KTH menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi mayoritas rumah tangga, meskipun terdapat sedikit variasi dalam pekerjaan lainnya seperti buruh tani dan wiraswasta.

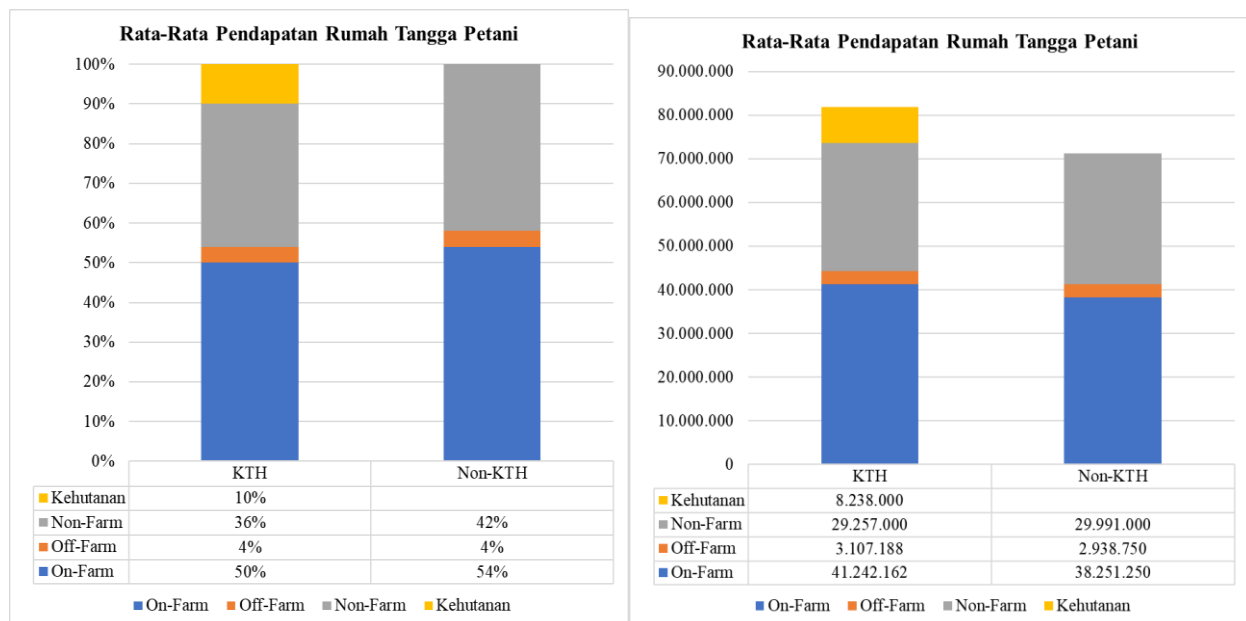
Tabel 4. Jumlah dan persentase responden berdasarkan pekerjaan utama, Desa Rantau Jaya Udik II, Sukadana, Lampung Timur, tahun 2025. Sumber: Data Primer Peneliti, diolah (2025)

Jenis pekerjaan	Anggota KTH		Non Anggota KTH		Total	
	N	%	N	%	N	%
Buruh Tani	2	10	2	10	4	10
Petani	11	55	12	60	23	57,5
Buruh Tani PT GGP	5	25	5	25	10	25
Lainnya	2	10	1	5	3	7,5
Total	20	100%	20	100%	40	100%

Sistem Penghidupan Rumah Tangga Petani

Ellis (2000) membagi sumber pendapatan menjadi tiga kategori utama, yaitu on-farm income, off-farm income, dan non-farm income. Pendapatan on-farm meliputi hasil dari lahan pertanian yang dimiliki atau disewa oleh petani. Pendapatan off-

farm berasal dari aktivitas yang masih dalam sektor pertanian, namun dilakukan di lahan orang lain, seperti tenaga kerja upahan atau sistem bagi hasil. Sementara itu, pendapatan non-farm mencakup usaha di luar sektor pertanian, seperti usaha kecil, remitan, atau pekerjaan jasa.



Gambar 2. Komposisi rata-rata pendapatan rumah tangga petani sekitar kawasan TNWK, Desa Rantau Jaya Udik II, Sukadana, Lampung Timur, tahun 2025

Sistem penghidupan rumah tangga petani di Desa Rantau Jaya Udik II menunjukkan keragaman yang signifikan dalam struktur pendapatan mereka.

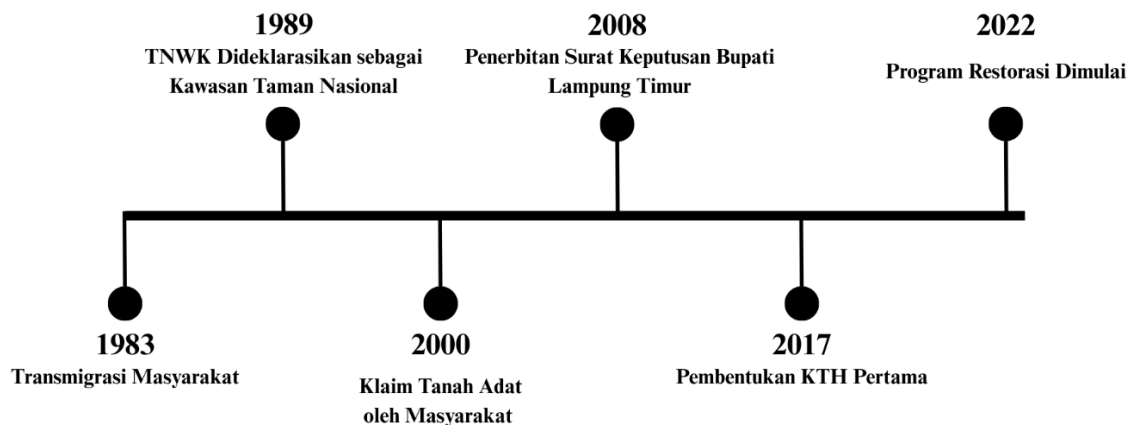
Pendapatan rumah tangga petani terbagi dalam empat sektor utama: on-farm, off-farm, non-farm, dan kehutanan. Gambar 2 di bawah ini

menggambarkan komposisi rata-rata pendapatan rumah tangga petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dan yang tidak tergabung (non-KTH), serta kontribusi masing-masing sektor terhadap total pendapatan rumah tangga. Dari visualisasi yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa sektor on-farm (pertanian) tetap menjadi sektor utama bagi kedua kelompok, dengan kontribusi 50% pada KTH dan 54% pada non-KTH. Sektor ini mencakup komoditas utama seperti singkong, karet, dan jagung, yang merupakan sumber pendapatan utama. Namun, sektor-sektor lain juga berperan penting, khususnya bagi anggota KTH. Sektor kehutanan, yang meliputi kegiatan seperti budidaya lebah madu dan restorasi ekosistem, menyumbang 10% dari total pendapatan rumah tangga anggota KTH. Hal ini menunjukkan bahwa akses anggota KTH terhadap sumber daya alam sekitar TNWK memberikan peluang ekonomi tambahan yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, rumah tangga non-KTH lebih mengandalkan sektor non-farm, yang menyumbang 42% dari total pendapatan mereka. Sektor non-farm ini meliputi kegiatan ekonomi di luar pertanian, seperti perdagangan dan usaha kecil, yang memberikan pendapatan lebih stabil dibandingkan sektor pertanian yang lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Walaupun sektor on-farm tetap menjadi sektor utama, pendapatan dari sektor non-farm menunjukkan semakin pentingnya peran diversifikasi pendapatan di luar pertanian. Dengan adanya diversifikasi pendapatan, anggota KTH dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Sektor kehutanan menjadi tambahan yang penting, memberikan pendapatan yang cukup signifikan bagi rumah tangga yang terlibat dalam konservasi. Di sisi lain, rumah tangga non-KTH, yang lebih terbatas dalam mengakses sektor kehutanan, lebih mengandalkan pekerjaan tetap di luar sektor pertanian, seperti menjadi buruh tani di PT GGP. Pekerjaan ini memberikan kestabilan

pendapatan yang lebih terjamin meskipun tanpa akses ke sektor kehutanan.

Hubungan Sosial Ekologi di Desa

Hubungan sosial-ekologi antara masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perjalanan hubungan ini dapat digambarkan melalui trajektori yang menunjukkan perubahan pola interaksi antara masyarakat dan kawasan konservasi. Sebelumnya, masyarakat yang tinggal di sekitar TNWK mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, hubungan ini mulai bergeser menuju upaya konservasi yang lebih berkelanjutan. Gambar 3 menunjukkan trajektori perubahan hubungan sosial-ekologi ini, dimulai dengan program transmigrasi lokal pada tahun 1983. Program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengatur tata batas kawasan yang dipersiapkan menjadi Taman Nasional Way Kambas. Masyarakat yang tadinya bermukim dan bergantung pada sumber daya alam di dalam kawasan hutan direlokasi ke wilayah penyangga, dengan kompensasi pemberian ruang pemukiman dan lahan garapan bersertifikat hak milik di luar kawasan konservasi. Program transmigrasi ini menjadi titik awal perubahan besar dalam pengelolaan kawasan, meskipun awalnya menyebabkan ketegangan masa transisi antara masyarakat dan pengelola hutan. Setelah itu, pada era reformasi sekitar tahun 2000, masyarakat yang terdampak kebijakan relokasi masa lalu mulai mengklaim kembali tanah adat sebagai hak mereka, yang menciptakan ketegangan lebih lanjut terkait pembatasan akses terhadap sumber daya alam di dalam kawasan konservasi yang sudah ditetapkan secara definitif.



Gambar 3. Trajektori Hubungan Sosial-Ekologi di Rantau Jaya Udik II. Sumber: Wawancara mendalam peneliti (2025)

Pada tahun 2008, tingginya eskalasi konflik satwa yang merugikan lahan pertanian masyarakat direspons oleh pemerintah daerah melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Timur Nomor: 522/341/B/2008 tentang Tim Kerja Terpadu Penanggulangan Konflik Gajah-Manusia. Meskipun pembentukan regulasi ini lahir di tengah konflik yang meruncing, SK tersebut menjadi landasan awal dari pergeseran kebijakan menuju tata kelola penanganan konflik yang lebih terstruktur dan kooperatif. Selanjutnya, pada tahun 2017, terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) menandai langkah konkret menuju pengelolaan yang lebih ramah lingkungan, di mana masyarakat mulai berperan aktif dalam kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem yang rusak akibat aktivitas eksploitasi sebelumnya. Pembentukan KTH memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang lebih ramah lingkungan, seperti budidaya lebah madu dan restorasi hutan, yang juga membantu mengurangi ketergantungan pada kegiatan perambahan ilegal.

Puncaknya pada tahun 2022, dimulailah program restorasi yang lebih besar yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemulihan kawasan hutan yang telah rusak. Program ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pelestarian alam, sembari memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan konservasi. Di sinilah pergeseran hubungan sosial-ekologi yang signifikan terjadi, di mana masyarakat tidak lagi hanya sebagai pemanfaat sumber daya alam, tetapi mulai berperan aktif dalam pengelolaan kawasan dengan prinsip konservasi yang lebih kuat.

Pergeseran hubungan sosial-ekologi yang tercermin dalam trajektori ini menggambarkan

perubahan dari eksploitasi menuju pelestarian, di mana masyarakat kini lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian TNWK. Pengorganisasian komunitas melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Rantau Jaya Udik II mencerminkan prinsip Ostrom (1990) yang menekankan pentingnya aturan yang disepakati bersama dalam pengelolaan sumber daya bersama. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan, KTH berhasil menciptakan keberlanjutan sumber daya alam yang lebih efektif dan adil.

Menyelaraskan Kehutanan dan Ekonomi Masyarakat

Menyelaraskan kehutanan dan ekonomi masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II. Pengorganisasian komunitas melalui kelompok-kelompok seperti Kelompok Tani Hutan (KTH), Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan Masyarakat Peduli Api (MPA) telah menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan TNWK. Kelompok-kelompok ini tidak hanya berperan dalam konservasi, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan yang ramah lingkungan. Elias (2012) menekankan bahwa program yang menggabungkan konservasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti program KTH di Desa Rantau Jaya Udik II, dapat meningkatkan efektivitas konservasi sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Sebagai contoh, Kelompok Tani Hutan (KTH) telah berperan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, memberikan alternatif pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat. Sejak

pembentukan KTH pada 2017, kegiatan budidaya lebah madu dan restorasi hutan telah menjadi sumber pendapatan tambahan yang cukup signifikan bagi anggota kelompok ini. Berdasarkan analisis struktur nafkah, kegiatan konservasi legal ini mampu menyumbang sekitar 10% dari total pendapatan rumah tangga anggota KTH. Penyelarasan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian ini bukanlah sekadar inisiatif organik, melainkan bentuk implementasi nyata dari kebijakan Kemitraan Konservasi yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P.8/2019. Melalui kebijakan ini, negara memberikan legalitas bagi masyarakat (melalui KTH) untuk mengakses zona tertentu di TNWK guna pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (seperti lebah madu) dan terlibat dalam pemulihan ekosistem. Dengan demikian, KTH berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mengubah status aktivitas masyarakat yang dulunya dianggap ilegal menjadi aktivitas konservasi yang diakui secara administratif dan didukung oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penuturan warga: "Waktu itu kan awal mula 2017 itu, ada dua desa yang jadi percobaan. Rantau Jaya Udik 2 sama Brajaharjosari. Jadi yang jadi sampel itu yaitu RJU 2 sama Harjosari, Buat Lebah." (Bapak BS, 47 tahun).

Program ini tidak hanya mendiversifikasi sumber pendapatan, tetapi juga terbukti mengurangi ketergantungan masyarakat pada eksploitasi ilegal hasil hutan. Perubahan perilaku ini terekam kuat melalui data kualitatif, di mana masyarakat secara terbuka mengakui beralihnya pola nafkah mereka berkat adanya fasilitasi dari TNWK. "Awalnya dari ngambil kayu gitu terus ya orang namanya butuh makan, ngambil burung. Sekarang udah nggak, udah dikasih bantuan sama TNWK dibikin kelompok," ungkap salah seorang informan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketidakmerataan pemberdayaan di antara kelompok-kelompok yang ada, terutama di Dusun 4, yang mendapatkan perhatian lebih dalam program pemberdayaan. Beberapa kelompok di dusun lain merasa tertinggal dan tidak mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan konservasi dan pemberdayaan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, "Di Dusun 4, bisa dikatakan setiap bulan, pihak kehutanan selalu bertemu dengan masyarakat. Namun, kenyataannya, ada perasaan tidak puas di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa iri karena yang terlibat itu-itu saja." (Bapak BR, 40 tahun). Ketidaksetaraan ini perlu segera diatasi agar semua kelompok dapat berpartisipasi secara merata

dalam kegiatan konservasi dan mendapatkan manfaat ekonomi yang seimbang.

Pengorganisasian ini juga menghadapi tantangan terkait insentif yang kurang memadai bagi anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan KTH. "MMP itu bekerja tiga hari dalam sebulan. Setiap perjalanan mendapat kompensasi Rp60.000, jadi total per bulan Rp180.000. Namun, kenyataannya di lapangan, saya sering bekerja lebih." (Bapak BS, 47 tahun). Meskipun anggota MMP memiliki peran vital dalam mengelola konflik manusia-satwa liar dan menjaga kelestarian TNWK, insentif yang diberikan terkadang tidak sebanding dengan waktu dan upaya yang mereka habiskan.

Walaupun tantangan-tantangan tersebut masih ada, pengorganisasian komunitas telah berhasil menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan. Sejalan dengan prinsip Berkes (2018) mengenai *community based resource management* (CBRM), di mana konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mendukung kesejahteraan ekonomi mereka. Sebagai contoh, Kelompok Wanita Tani (KWT) berperan dalam pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan yang bernilai jual, seperti kripik singkong, tempe, dan pisang. Meskipun anggota KWT bukan merupakan responden utama dalam survei kuesioner, mereka adalah pasangan (istri) dari kepala rumah tangga petani yang menjadi responden, sehingga peran pengolahan ini berkontribusi langsung pada akumulasi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut. KWT telah membuka peluang bagi wanita untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan sambil mendukung keberlanjutan alam. KWT juga memperkuat kesadaran akan pentingnya keberagaman ekonomi berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Keberhasilan pengorganisasian komunitas di Desa Rantau Jaya Udik II mencerminkan bahwa dengan partisipasi aktif masyarakat, konservasi dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan seiring. Program-program seperti budidaya lebah madu, restorasi ekosistem, dan pengolahan hasil pertanian berbasis konservasi telah memperkuat ketahanan sosial-ekologi di desa ini, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam.

KESIMPULAN

1. Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II telah berhasil menyelaraskan antara pendapatan

- rumah tangga dan kebijakan konservasi melalui Kelompok Tani Hutan (KTH), dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, seperti budidaya lebah madu dan restorasi ekosistem, telah memberikan pendapatan tambahan yang stabil dan ramah lingkungan.
 3. Konflik manusia-satwa liar dan pembatasan akses terhadap sumber daya alam tetap menjadi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
 4. Pengorganisasian komunitas melalui kelompok-kelompok seperti KTH dan ekowisata telah membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak Taman Nasional Way Kambas, Perangkat Desa Rantau Jaya Udik II dan seluruh Komunitas Petani di Rantau Jaya Udik II yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama pengambilan data. Tulisan ini merupakan bagian dari skripsi yang disusun oleh Afriel Amar Ar Rasyid dan telah dinyatakan lulus pada sidang tanggal 8 September 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah dan persentase rumah tangga di sekitar kawasan hutan*. <https://www.bps.go.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang kemitraan lingkungan hidup*. Jakarta, Indonesia: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Statistik kehutanan Indonesia 2022*. Jakarta, Indonesia: KLHK. <http://www.menlhk.go.id>
- Anderies, J. M., Janssen, M. A., & Ostrom, E.. (2004). A framework to analyze the robustness of social-ecological systems from an institutional perspective. *Ecology and Society*, 9(1), 18. <https://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art18/>
- Berkes, F.. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.
- Creswell, J. W.. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dharmawan, A. H.. (2024). *Sistem penghidupan dan dinamika hubungan sosial ekologi di kawasan pedesaan*. IPB Press.
- Dharmawan, A. H.. (2007). Dinamika sosio-ekologi pedesaan: Perspektif dan pertautan keilmuan ekologi manusia, sosiologi lingkungan dan ekologi politik. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 1(1), 1–40.
- Elias, S.. (2012). From communal forests to protected areas: The implications of tenure changes in natural resource management in Guatemala Amazon. *Conservation and Society*, 10(2), 151–160.
- Ellis, F.. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Ginting, Y., Dharmawan, A. H., & Sekartjagrarni, S.. (2010). Interaksi komunitas lokal di Taman Nasional Gunung Leuser. *Sodality*, 4(1), 39–58. <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.5853>
- Kuswanda, W., Haryono, M., & Utomo, H.. (2022). Can humans and elephants coexist? A review of the conflict on Sumatra Island, Indonesia. *Diversity*, 14(3), 1–14. <https://doi.org/10.3390/d14030149>
- Marina, I., & Dharmawan, A. H.. (2011). Analisis konflik sumber daya hutan di kawasan konservasi. *Sodality*, 5(1), 90–96.
- Ostrom, E.. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Shields, B. P., Moore, S. A., & Eagles, P. F. J.. (2016). Indicators for assessing good governance of protected areas: Insights from park managers in Western Australia. *PARKS*, 22(1), 37–50. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.PA_RKS22-1BPS.en
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Treves, A., & Karanth, K. U.. (2003). Human-carnivore conflict and perspectives on carnivore management worldwide. *Conservation Biology*, 17(6), 1491–1499. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2003.00059.x>